

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya administrasi tujuan yang ingin dicapai tidak akan berjalan dengan baik dan terarah. Setiap kebijakan yang diambil harus memperhitungkan berbagai permasalahan yang ada di ruang lingkup administrasi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri berkaitan pada berbagai macam permasalahan yang terjadi pada masyarakat umum, sehingga dengan adanya hal tersebut sebagai masyarakat harus mematuhi berbagai kebijakan atau peraturan yang telah dibuat untuk mengatur jalannya administrasi yang baik pada masyarakat. Selain itu adanya administrasi pembangunan harus dilaksanakan dengan baik, lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada hubungannya dengan administrasi. Dengan demikian pembangunan tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri secara maksimal.

Menurut Suryono (2004: 37) pembangunan berarti upaya terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga mampu keluar dapat berhubungan serasi ,selaras dan dinamis; sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan tidak semudah yang diharapkan, karena berbagai macam permasalahan muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Seperti adanya kesenjangan, pengangguran, dan akhirnya kemiskinan yang menjadi masalah pokok

dalam pelaksanaan proses pembangunan. Berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan permasalahan multi sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kemiskinan harusnya menjadi masalah yang sudah dituntaskan, namun pada kenyataannya kemiskinan tidak pernah berhenti menghantui dan selalu menjadi prioritas utama pekerjaan rumah oleh para pemimpin di negara ini.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 yang terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yakni pada pola sentralisasi ke pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan dari UU No 23 tahun 2014 menganut prinsip : 1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta potensi dan keanekaragaman daerah; 2) harus lebih meningkatkan kemandirian daerah; 3) didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab; 4) harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah.

Dalam era otonomi daerah dan perdagangan bebas, industri kecil memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian negara, sehingga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian diharapkan mampu menciptakan kondisi industri kecil yang sehat, kuat serta mandiri. Bukan dengan kebijakan yang justru menyulitkan dan menghambat kegiatan industri kecil seperti peraturan dan persyaratan administratif yang rumit. Dalam TAP MPR Nomor: XIV Tahun 1998 yang telah diamanatkan agar UMKM berperan lebih besar serta memiliki daya saing yang kuat. Namun, melihat salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM dan menunjang jaringan kerjasama antar sesama pelaku

usaha adalah program kemitraan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 usaha kecil, Menengah bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil yaitu mewujudkan kemitraan.

Banyak Negara yang sedang berkembang yang memandang industrialisasi sebagai salah satu cara yang paling efektif dan mungkin juga paling cepat untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Oleh karena pandangan yang demikian, maka SEKTOR industri sering dijadikan sebagai objek pembangunan di bidang ekonomi yang sangat penting. Pandangan demikian sering terdapat baik di Negara berkembang yang besar dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, maupun di Negara berkembang yang kecil karena tidak memungkinkan pelaksanaan pembangunan di SEKTOR pertanian secara intensif, mengalihkan perhatiannya pada industriliasasi (Sondang,1984:131)

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat daerah, dengan meningkatkan potensi daerah masing-masing, maka setiap daerah atau wilayah akan memiliki keahlian dan produktivitas yang berbeda.

Sejalan dengan dinamika dan tujuan pembangunan di Indonesia tersebut, Kota Pasuruan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ditinjau dari segi transportasi darat, saat ini Kota Pasuruan berada pada posisi strategis yaitu pada posisi silang jalan arteri primer Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (Bali) dan Malang-Pasuruan-Banyuwangi (Bali). Kondisi ini merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan kota. Dimana ekonomi kota yang dulunya mendapat dukungan utama dari sektor pertanian dan perikanan, saat ini

telah berkembang sektor ekonomi yang lain, yaitu perdagangan dan jasa sertadengan dukungan industri yang dominan adalah industri mebel dan logam.

Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Pasuruan sangat berpotensi untuk dikelola menjadi produk yang berkualitas ekspor. Pemerintah Kota Pasuruan memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan IKM, diantaranya dengan memberikan pelatihan teknologi proses dan manajemen produksi, fasilitasi kepada pelaku pasar melalui kegiatan promosi, pelayanan teknis melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kayu di Kelurahan Bukir dan UPTD Logam di Kelurahan Ngemplakrejo serta sarana pemasaran berupa pusat pasar mebel di Kelurahan Bukir dan Randusari.

Tabel 1.1
Potensi Industri di Kota Pasuruan

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)
I	<u>Tahun 2006</u>				
1.	Industri Logam, Mesin, Eletonika dan Aneka	1.083	6.213	52.144.858	249.580.763
2.	Industri Kayu, Agro dan Hasil Hutan	2.295	20.516	115.291.686	565.232.282
	Jumlah	3.378	26.729	167.436.544	814.813.045
II	<u>Tahun 2007</u>				
1.	Industri Logam, Mesin, Eletonika dan Aneka	1.087	6.234	51.511.258	250.160.313
2.	Industri Kayu, Agro dan Hasil Hutan	2.314	20.644	117.225.323	569.000.951
	Jumlah	3.401	26.878	169.736.581	819.161.204

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2007

Dari data yang diperoleh di atas, telah diketahui bahwa jenis industri logam, mesin,elektronika dan Aneka memiliki nilai produksi Rp249.580.736 dan investasi sebesar

Rp52.144.858 pada tahun 2006. Nilai tersebut lebih kecil dibanding hasil dari jenis industri Kayu, Agro, dan Hasil hutan memiliki nilai produksi sebesar Rp565.232.282 dan nilai investasi sebesar Rp 115.291.686 yang jauh lebih besar dibanding dari industri yang lainnya. Sehingga dari data yang diperoleh tersebut dapat dilihat bahwa industri kayu memang memiliki potensi yang lebih besar daripada industri lainnya yang ada di kota Pasuruan. Selain itu, komoditas ekspor hasil industri Kota Pasuruan berasal dari komoditas kayu olahan dan furniture dari kayu diantaranya berupa kerajinan kayu kelapa, mainan, asesoris mobil, mebel ukir dan mebel interior. Produk-produk tersebut telah mampu menembus pasar ekspor ke negara-negara di Asia Pasifik dan Eropa. Lokasi dari kawasan industri mebel terletak di Kelurahan Bukir, Sebani, Gentong, Krapyakrejo dan Petahunan. Dekat dengan sarana dan prasarana umum namun prasarana transportasinya kurang memadai, lebar jalan yang kurang memenuhi syarat sebagai lokasi yang strategis, dan area parkir yang tidak memadai.

Tenaga kerja sebagian besar terdiri dari keluarga dan tetangga sekitar sehingga industri ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Memiliki prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan karena tidak hanya dipasarkan dalam kota saja, namun jaringan pemasarannya sudah mencapai luar kota, bahkan luar negeri seperti kawasan negara Amerika dan kawasan Eropa.

Kendala yang dihadapi adalah masalah bahan baku tidak mudah didapatkan. Permodalan (meliputi keuangan dan peralatan) dan pemasaran hasil produksi, serta peningkatan sarana jalan untuk peningkatan kenyamanan konsumen. Produk industri mebel ini adalah kursi tamu, meja makan, almari, tempat tidur dll. Teknologi yang digunakan semi modern yaitu memadukan tradisional dan menggunakan mesin, sedangkan bahan baku sudah

mulai sukar didapatkan, hal ini terkait dengan kualitas kayu yang dibutuhkan.(www.Pasuruankota.go.id diakses pada tgl 4 Mei 2014)

Dalam peranan pemerintah daerah Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan sektor investasi dan perdagangan, maka rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2008-2025 diarahkan pada upaya:

1. Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik di bidang investasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing ;
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur;
4. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.

Kenyataan yang terjadi bahwa sebenarnya setiap kegiatan atau produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat memiliki kekurangan dan lebihnya. Contoh kurangnya seperti yang sudah diterangkan diatas yaitu mengenaikendalapedemerolehanbahan baktidak mudah didapatkan. Permodalan (meliputi keuangan dan peralatan), dan pemasaran hasil produksi, serta peningkatan sarana jalan untuk peningkatan kenyamanan konsumen) yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan di kawasan sentra industri mebel di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. Dimana permasalahan tersebut terkait dengan harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Pasuruan selaku penggerak dan pengawas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pasuruan

Pemerintah Kota Pasuruan yang bergerak sebagai pengawas tersebut lebih spesifiknya yaitu Dinas Industri dan Perdagangan. Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan peningkatan sektor industri mebel di kawasan sentra industri mebel. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih jelasnya bagaimana peran pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan perannya sebagai *stakeholder* yang pembuat, pengawas dan pengontrol kebijakan yang dibuat guna memberikan perubahan yang lebih baik dalam memberdayakan potensi kelurahan Bukir sebagai sentra industri mebel di Kota Pasuruan. maka penulis memilih judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Mebel Di Kota Pasuruan (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Jawa Timur).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemerintah daerah Kota Pasuruan dalam usahanya untuk pemberdayaan sentra industri mebel kelurahan Bukir Kota Pasuruan?
2. Bagaimana keberdayaan Industri kecil di sentra mebel Kelurahan Bukir Kota Pasuruan?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan sentra industri mebel di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai usaha untuk pemberdayaan sentra industri mebel kota Pasuruan

2. Untuk mengetahui keberdayaan Industri Kecil di sentra mebel Kelurahan Bukir Kota Pasuruan
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan sentra industri mebel di kelurahan Bukir Kota Pasuruan.

D. Kontribusi penelitian

1. Kontribusi akademis
 - a) Bagi mahasiswa

Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya, dan ilmu pengetahuan umumnya.

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.

Sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

- b) Bagi fakultas

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan program.

2. Kontribusi praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini dinkoperindag Kota Pasuruan dalam mengambil kebijakan selanjutnya terkait pemberdayaan industri mebel.

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi industri terkait, yaitu sentra industri mebel di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang akan dibahas secara keseluruhan. Sistematika pembahasan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara umum penulisan laporan tugas akhir, yaitu : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diajukan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang uraian tentang hasil dan pembahasan serta analisa oeran Dinkosperindag dalam pemberdayaan sentra industri mebel sebagai strategi pembangunan yang bertumpu pada kegiatan masyarakat.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang didapa dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran

